
INDONESIA NET ZERO SUMMIT 2023

It's Now or Never!

Sabtu, 24 Juni 2023

Djakarta Theater XXI, Jakarta

Sesi C1

“Mimpi Indonesia Bebas Emisi: Apakah Kebijakan, Regulasi, dan Insentif Saat Ini Sudah Cukup?”

MODERATED DISCUSSION

Cazadira Fediva Tamzil (Pijar Foundation), Moderator:

Nama saya Chazadira Fediva Tamzil, *Director of Public Policy* dari Pijar Foundation. Merupakan kehormatan bagi saya hari ini untuk bisa memoderatori sesi berjudul “Mimpi Indonesia Bebas Emisi: Apakah Kebijakan, Regulasi, dan Insentif Saat Ini Sudah Cukup?”.

Tujuan utama dari sesi ini sebenarnya untuk menjawab pertanyaan tersebut. Kita ingin melihat pandangan dari sektor privat dan komunitas masyarakat serta *think-tank*, mengenai apakah peraturan-peraturan, regulasi, dan insentif dari pemerintah untuk *net-zero* ekonomi sudah cukup memadai atau tidak.

Kita sama-sama berdiskusi dan bertukar pikiran mengenai langkah-langkah konkrit yang bisa kita lakukan untuk mendorong keterlibatan *whole of society* menuju *net zero economy* di Indonesia.

Untuk set konteks dari panel kita hari ini, saya mengundang Mbak Tiza Mafira untuk *share her thoughts and insights on the Indonesian regulatory and policy landscape when it comes to net zero economy. I understand you want to probably focus more on energy today. It is a very important sector* sebagai penyumbang emisi terbesar, salah satunya di Indonesia sendiri.

Tiza Mafira (Climate Policy Initiative Indonesia), Panelist:

Saya hari ini akan memulai dengan sebuah konteks regulasi, sesuai yang diminta. Sebenarnya Indonesia sudah memiliki regulasi-regulasi yang sudah mencukupi dan mumpuni bagi kita untuk selamat dari krisis iklim ini. Sebenarnya sudah banyak kebijakan dan regulasi terkait *issue* itu di Indonesia. Salah satunya adalah *NDC (Nationally Determined Contribution)*, yang memetakan jalan kita menuju pengurangan emisi di tahun 2030. Selain itu terdapat *NZE (Net Zero Emissions Target)*, yang memetakan bagaimana Indonesia dapat mencapai *net-zero* di tahun 2060. Kemudian apabila kita bicara soal energi, terdapat Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) dan RUPTL (Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik) yang fokus dalam ketenagalistrikan), yang mana memperlihatkan berapa bauran energi terbarukan Indonesia untuk tahun-tahun ke depan.

Saya ingin bertanya kepada teman-teman di sini. Apakah ada teman-teman yang terlibat dalam penyusunan NDC, NZE, RUEN, atau RUPTL? Silakan.

Cazadira Fediva Tamzil (Pijar Foundation), Moderator:

Silakan mungkin ada yang bisa tunjuk tangan jika pernah terlibat.

Tiza Mafira (Climate Policy Initiative Indonesia), Panelist:

Saya berasumsi bahwa teman-teman di sini berasal dari masyarakat dan kelompok masyarakat yang peduli dengan krisis iklim, ingin membangun Indonesia bersama-sama, dan turut memikirkan bagaimana Indonesia bisa selamat dari krisis iklim dengan baik. Proses pembuatan peta jalan di Indonesia sangat cermat secara teknokratis dan banyak studi yang dilakukan. Namun menurut saya, semua proses ini kurang terbuka untuk masukan dari penggerak ekonomi itu sendiri, yaitu swasta dan masyarakat. Saya pun tidak terlibat, sejujurnya.

Kenapa kita perlu terlibat dan kenapa kita perlu mengetahui isi-isi dari peta jalan ini? Karena kita yang menggerakkan peta jalan itu nanti. Kita yang menentukan, apakah krisis iklim ini akan menjadi malapetaka ekonomi apabila kita tidak *manage*-nya dengan baik atau justru menjadi peluang ekonomi jika kita *manage*-nya dengan baik. Tentu saya dan kita semua menginginkan agar ini menjadi peluang ekonomi. Supaya bisa menjadi peluang ekonomi, maka yang harus terlibat adalah pihak swasta dan masyarakat.

Jadi saya akan bercerita sedikit soal status dari pihak-pihak ini sekarang. Bagaimana dengan pihak swasta? Pertanyaannya adalah, “Apakah pihak swasta percaya diri melakukan investasi hijau di Indonesia?”. Menurut saya, berdasarkan observasi yang saya lakukan dan studi-studi, diskusi, dan *focus group discussion* yang kami lakukan, jawabannya adalah belum percaya diri. Misalnya di sektor listrik di Indonesia, sebenarnya banyak sekali pihak yang tertarik investasi di energi terbarukan. Saat ini kita membutuhkan 335 kali lipat pembangunan solar panel dari yang ada sekarang. Solar panel adalah potensi *renewable energy* terbesar di Indonesia. Indonesia beriklim panas dan terkena sinar matahari yang merata di seluruh daerah serta mempunyai potensi energi terbarukan dari panel surya yang luar biasa. Akan tetapi, saat ini pembangunan panel surya kurang dari 335 *magnitude* yang dibutuhkan. Meskipun Indonesia memiliki banyak komitmen dalam membangun *renewable energy*, tetapi *market attractiveness* atau daya tarik pasar Indonesia untuk energi terbarukan adalah salah satu yang paling rendah di Asia — kalah dari India, Cina, Vietnam, Singapura, dan Malaysia. Menurut Fitch, skornya adalah 25 dari skor tertinggi 100. Investasi *renewable energy* di Indonesia tidak menarik — meskipun banyak sekali yang ingin masuk — karena ada peraturan yang berubah-ubah, ada kesulitan untuk mengakses pendanaan, dan ada ketidakpastian dari regulasi untuk para peminat energi terbarukan di Indonesia.

Apabila kita bicara sektor perbankan, sekarang sektor perbankan dan sektor lembaga keuangan sudah terbuka. Terdapat ESG (*Environmental, Social, Governance*). Menurut bank, jika kita berinvestasi di proyek yang hijau, kita bisa mempunyai reputasi yang lebih baik, sehingga proyek hijau pun bisa dicari di Indonesia. Ternyata proyek-proyek hijau di Indonesia dan proyek energi terbarukan di Indonesia masih dianggap *high risk* oleh lembaga keuangan. Ketika dianggap *high risk*, bunganya pun membesar. Jadi jika kita meminjam ke bank untuk membangun pembangkit listrik energi terbarukan, seperti pembangkit listrik tenaga surya dan pembangkit listrik tenaga angin, bunganya pun akan sangat mahal karena sektornya dianggap penuh dengan resiko. Ini masih berhubungan dengan ketidakpastian regulasi dan sebagainya.

Satu hal lagi yang dilihat oleh bank perbankan adalah apakah *return*-nya besar? Apakah bisnisnya menguntungkan? Itu dianggap kurang besar karena meskipun energi terbarukan mempunyai *cost technology* sangat murah di dunia, tetapi apabila dibandingkan dengan harga batu bara di Indonesia, itu masih lebih mahal. Ini karena harga batu bara dan harga diesel di Indonesia masih diberikan subsidi, sedangkan subsidi tersebut belum dialihkan ke energi terbarukan. Jika kita meminta uangnya, sebagaimana judul acaranya, yaitu *unlocking trillions* untuk menuju *net-zero*, apakah *trillions*-nya ada di dunia ini? Ada. Di dunia ini, aset yang dikelola oleh *asset managers* di pasar uang adalah 200 triliun dolar AS. Akan tetapi, untuk bisa membuka aset itu supaya dapat diinvestasikan di Indonesia untuk sektor hijau, perlu *low risk, high return*.

Kemudian satu hal lagi yang ingin saya bicarakan adalah masyarakat. Tidak hanya swasta yang harus bergerak, masyarakat pun juga harus bergerak. Pertanyaannya adalah apakah masyarakat memahami perannya dalam membangun masa depan *net-zero*? Apakah kita sudah cukup pembekalan mengenai apa yang menjadi peran kita, bukan hanya sebagai *survivor* tapi juga sebagai pelaksana, sebagai investor, dan sebagai profesional, yang menggerakkan ekonomi hijau? Apakah kita sudah memahami bermacam-macam energi terbarukan di Indonesia? Apakah di sekolah-sekolah sudah terdapat kurikulum mengenai perubahan iklim? Apakah di universitas-universitas sudah ada fakultas mengenai teknik energi terbarukan? Apakah sudah ada SMK yang khusus fokus pada energi terbarukan? Jawabannya adalah belum.

Jadi ini yang terjadi ketika kita bertanya kepada perusahaan-perusahaan yang bekerja di sektor batu bara saat ini. Trennya bergerak menuju energi terbarukan. Apakah kalian memikirkan jika semakin banyak yang tidak ingin menggunakan batu bara lagi di *main market*, masyarakat justru ingin menggunakan energi terbarukan? Jawabannya adalah iya. Lalu apakah kalian mempersiapkan *modal business* untuk berkonversi, diversifikasi bisnis ke sektor-sektor energi terbarukan? Mereka pun berkata, “Tenaga ahlinya kurang, belum ada yang *expert*, dan susah mencarinya. Anak-anak muda di Indonesia dan *hiring-hiring* baru kita belum banyak yang paham. Kita harus rekrut tenaga asing dulu sekarang. Sedangkan tenaga asing itu mahal. Kalau kita *train* sendiri pun juga mahal.” Artinya harus ada kehadiran dari pemerintah untuk mempersiapkan masa depan Indonesia yang penuh dengan *green jobs*. *Green jobs* itu tidak ada dulu, baru tenaga kerjanya datang. *Green jobs* dimulai dari *skill* dulu, *skill* itu yang kemudian menciptakan *green jobs* di masa depan. Karena bukan pemerintah yang menciptakan *jobs*, namun yang menciptakan *jobs* adalah kita sendiri. Menurut saya hal-hal itu yang menjadi tantangan-tantangan, bahwa meskipun kebijakan pemerintah sudah ada dan pembuatan kebijakan-kebijakan tersebut sudah cermat dari segi teknokratis, tetapi pemerintah tidak bisa mewujudkan itu sendiri. Harus ada *co-creation* bersama dengan pihak swasta dan masyarakat, karena kita yang akan mewujudkan ekonomi hijau seperti apa di masa depan. Itu dulu dari saya.

Cazadira Fediva Tamzil (Pijar Foundation), Moderator:

Thank you. Tepuk tangan untuk Mbak Tiza. Sangat menarik, karena di awal *opening* panel kita mendengar bahwa Indonesia mempunyai banyak sekali potensi sumber energi terbarukan dan pemerintah telah mengeluarkan banyak kebijakan. Tapi di sini Mbak Tiza ingin *touch on the notion of participation* dari *both public and private sector* dalam menyampaikan aspirasi, karena regulasi dan kebijakan sangat

berpengaruh terhadap *attractiveness* Indonesia sebagai tujuan investasi — apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara yang juga memiliki sumber-sumber energi terbarukan.

Ini *segue* yang menarik untuk Pak Ridha. Pak Ridha saat ini sebagai *CEO* dari Indonesia Investment Authority atau INA. Lembaga yang cukup baru. Mungkin Pak Ridha berkenan untuk *share* sedikit tentang peran INA dalam mewujudkan investasi berkelanjutan dan bagaimana pendapat Bapak mengenai *landscape* kebijakan Indonesia dari mata investor?

Dr. Ridha Wirakusumah (Indonesia Investment Authority), Panelist:

Selamat pagi, rekan-rekan semua. Terima kasih, Mbak Adira.

INA adalah *sovereign wealth fund* atau dana abadi di Indonesia yang dibentuk oleh Indonesia untuk bisa membangun kesejahteraan untuk anak-cucu kita dan untuk semua yang ada di sini, generasi ke depan Indonesia. Kami diberikan kepercayaan untuk mengolah dana Rp 75 triliun untuk bisa dikembangkan kira-kira ekuivalen dengan \$5 *billion*. Negara Singapura yang kecil mempunyai 2 *sovereign wealth fund* yang bernama Temasek dengan \$300 *billion* dan GIC (Government of Singapore Investment Corporation) dengan \$690 *billion*. Jadi, jika \$5 *billion* dengan Temasek dan \$300 *plus* GIC dengan \$.690 *billion*, sepertinya kita terlihat sangat kecil.

Ada negara kecil yang namanya Timor Leste, yang mana mempunyai tabungan *sovereign wealth fund* \$17 *billion*, di mana itu sudah 3-4 kalinya kita. *Sovereign wealth fund* Indonesia diberi mandat untuk membangun kesejahteraan dengan cara berinvestasi, sehingga bisa *create value* bersama-sama dengan investor-investor dari luar negeri dan dalam negeri di sektor-sektor guna membantu pembangunan Indonesia. Kira-kira itu sedikit tentang INA.

Bicara soal emisi, Cina menempati peringkat satu dalam *top 10 emitters* di dunia, yang mana menghasilkan 10.000 mtCO₂. Sedangkan United States menghasilkan 5.400 mtCO₂. Indonesia berada di urutan nomor sepuluh, menghasilkan 615 mtCO₂. Jadi Indonesia termasuk salah satu *the biggest polluters*. Tapi jika bicara soal per kapita, kita memang sangat kecil. Jika di Amerika 15 ton/orang, di Indonesia hanya menghasilkan 2 ton/orang. Jadi *basically* sebenarnya Indonesia agak kecil dilihat dari segi per kapita. *However*, karena negara kita besar dan berpopulasi banyak, 2 ton itu akan bisa meningkat dengan cepat jika kita tidak berhati-hati. Dari sisi industri, *pollutant* terbesar adalah energi, *transport* (mobil, kereta api, kapal, dan sebagainya), serta *manufacturing* dan *agriculture*.

Mengetahui hal tersebut, apa yang INA lakukan? *What can we actually do?* *By the way* bicara soal dana yang kami olah sebesar \$5 *billion* tadi, setelah berjalan selama 2 tahun sudah meningkat menjadi \$8 *billion*, yang mana sudah mengalami perkembangan yang cukup baik.

Kami telah melakukan beberapa hal di bagian energi. Kami dengan *one of the largest renewable company energy* di dunia membawa IPO Pertamina Geothermal Energy, yang mana merupakan *the largest renewable company in Asia, the second largest in the world*. Indonesia diberkati dengan panas bumi yang luar biasa, jadi potensi *geothermal energy*-nya besar sekali. Nama sahamnya PGE. Ketika IPO mencapai Rp 9 triliun, kita bekerja sama dengan Masdar dari UEA (Uni Emirat Arab), yang merupakan *one of the largest renewable company in the world*. Itu salah satu *action* kita.

Kita juga membuat *ETM platform (Energy Transition Mechanism)* untuk memindahkan *coal* ke *renewable*. Lalu kita baru saja menandatangani *joint venture* dengan *the largest battery company in the world*, yang dulu pernah kita tanda tangani juga *MoU* nya di G20. Mudah-mudahan kita bisa *raise* sekitar Rp30 triliun atau \$2 *billion* untuk *invest* di seluruh *value chain electric vehicle* di Indonesia.

Selanjutnya adalah transportasi. Kita sudah *invest* di *toll road*. Kita sudah membuat *platform* sebanyak Rp 44 triliun di jalan tol Jawa dan sebentar lagi ke Sumatera. Kita juga baru saja tanda tangan untuk memodernisasi Pelabuhan Belawan bersama dengan *the largest port operator in the world*, yaitu Dubai Port World. Kita juga sedang menggarap *potentially airport*.

Sebagai penutup, saya mau komentar sedikit, Mbak Tiza. *When we talked about regulation*, tadi Mbak Tiza berkata, “Sepertinya sudah ekstensif sekali dan sudah *very comprehensive*, tapi bagaimana tugas kita sebagai masyarakat untuk memberikan komentar?”. Saya berikan contoh, Anda bisa mengikuti nasihat dari Mbak Tiza dengan menggunakan *renewable energy* seperti memasang solar panel di rumah supaya bisa mereduksi listrik. *As simple as that*, ternyata PLN tidak memperbolehkan jual dan pakai. Pemakaian cuma bisa dilakukan maksimum sekitar 20% atau 15%. *So that’s actually what I call when the rubber meets the road*. Regulasi *is* regulasi, tapi kita tidak bisa berbuat apapun. *So I think that’s something you actually have to ask*. Jika ada orang ingin beralih menuju *renewable energy* dan *return on investment*-nya baik, maka banyak orang pula yang akan beralih dan menggunakannya. *So basically that’s one of the things you need to ask yourself*. Tentunya kami akan *lobby* bersama, bagaimana caranya supaya PLN tidak perlu membangun listrik secara banyak karena *renewable energy*-nya akan kita bangun. Dari *feedback* saya seperti itu. Terima kasih.

Cazadira Fediva Tamzil (Pijar Foundation), Moderator:

Terima kasih banyak, Pak Ridha. Tepuk tangan untuk Pak Ridha. Berikutnya sebelum masuk ke *Q&A*, saya bisa bincang-bincang dengan Bu Shinta dan Pak Agus sebagai pelaku bisnis. Bagaimana perspektif Bapak mengenai regulasi yang terkadang terbentur ketika *the rubber already meets the road*? Bagaimana tanggapan Bu Shinta?

Shinta Widjaja Kamdani (Kamar Dagang dan Industri Indonesia), Panelist:

Terima kasih. Kebetulan KADIN saat ini sedang fokus kepada *sustainability* dan mempunyai tim khusus untuk *net-zero*. Bicara mengenai *net-zero*, apakah semuanya mengetahui *net-zero*? Apa kalian tahu di tahun berapa Indonesia ingin mencapai *net-zero*? Untuk mencapai *net-zero* 2060, *do you think government can do it alone*? Meskipun pemerintah berkata ingin mencapai *net-zero* 2060, saya rasa tidak mungkin pemerintah bisa mencapai itu sendiri.

Jika kita perhatikan, apakah kebijakannya sudah efektif? Apa yang dilakukan oleh pemerintah? Saya cek di *Climate Transparency Report* di 2022. Di situ terdapat *Climate Action Tracker* yang mengatakan bahwa kebijakan Indonesia *is insufficient*, karena emisi harus mencapai 450 di tahun 2030. Sedangkan dengan kebijakan saat ini, Indonesia hanya bisa mencapai penurunan emisi sekitar 1.100. Target emisi Indonesia menurut NDC (*Nationally Determined Contribution*) adalah sebesar 1.500. Jadi hal itu masih jauh. Menurut kami, bukan hanya ambisi namun juga *how to*? Apakah semua yang sudah dilakukan ini *on the right track*?

Sebenarnya upaya yang dilakukan pemerintah sudah banyak sekali dan itu sudah baik. Namun sayangnya masalah di Indonesia itu cuma satu, yaitu implementasi. Itu yang paling susah. Sebenarnya apa yang harus dilakukan untuk mencapai *net-zero*? Kami di KADIN mewakili pelaku usaha. Kami melihat bahwa tidak ada gunanya bicara saja dan terus mengkritik pemerintah di mana letak kesalahannya. Jumlah *audience* di sini yang terlibat dalam penyusunan kebijakan terkait hal ini pun hanya dua orang setelah ditanyakan Mbak Tiza. Kita ikut, bisa memberikan *input*, ditanya. Namun sayangnya, tidak semua masukan dari kita — sebagian besar — diterima.

Oleh karena itu, saat ini KADIN menyiapkan khusus *roadmap* untuk pemerintah yang akan datang. Setiap kali ada pergantian pemerintah, kita selalu menganggap bahwa hal itu merupakan suatu *opportunity*. Jadi kita memberikan masukan untuk hal-hal perlu perbaikan.

Kita mempunyai 7 aspek prioritas untuk bisa mencapai *net-zero*. Pertama, bagaimana kita mempunyai *industrial decarbonisation*. Kita tahu bahwa industri — manufaktur — salah satu yang paling tinggi emisi. Industri sebenarnya banyak yang mau melakukan dekarbonisasi, tapi tidak mudah dilakukan karena regulasinya kurang mendukung. Tidak hanya dari *supply*, namun juga harus dilihat dari sisi *demand*. Banyak teman-teman dari pabrik (sepatu, tekstil) yang bilang *buyer* mereka tidak mau kalau tidak ada *planning* untuk pencapaian *roadmap net-zero*. Apabila tidak ada *planning* untuk pencapaian *roadmap net-zero*, maka tidak akan dibeli. Harus *sustainable*. Maka dari itu, industri harus melakukan itu, *they have no choice*. *Unfortunately*, pelaksanaannya tidak semudah itu.

Kemudian aspek lain adalah dari segi investasi. Apabila membicarakan regulasi, regulasi bukan hanya mengenai EBT (Energi Baru Terbarukan), kehutanan, dan lain-lain. Tetapi juga regulasi yang berhubungan dengan investasi. Jika kita mau *drive* investasi untuk masuk karena kita perlu teknologinya, kita perlu *investment* untuk *financing* dan lain-lain, jelas harus disertai dengan *supporting regulation*. Sebenarnya Indonesia sudah mempunyai *regulation* yang bagus, contohnya RUU Cipta Kerja dan *Omnibus Law*, akan tetapi sayangnya implementasinya tidak semudah itu. Masih banyak regulasi yang tumpang tindih dan banyak yang tidak konsisten, diubah-ubah. Hal ini menyebabkan momok untuk investor masuk ke Indonesia. Regulasi dalam beberapa minggu bisa berubah. Regulasi dalam satu kementerian dengan kementerian lain bisa bertolak belakang pula. Hal-hal seperti ini yang harus kita benahi untuk harmonisasi antara kementerian.

Bicara soal *financial incentive*. Ini memegang peranan penting, baik itu *fiscal incentive* maupun *non-fiscal*. Contohnya pajak, pajak adalah kunci. Kita sudah mempunyai *tax holiday* dan *tax allowance*. Sebenarnya untuk penggunaan *renewable energy*, hal-hal seperti itu ada. Akan tetapi tidak semudah itu untuk dipakai. Jadi meskipun pemerintah mengeluarkan *incentive*, belum tentu bisa dimanfaatkan.

Kemudian bicara soal perbankan. Kita harapkan bahwa *green project* dari perbankan memberi suku bunga lebih murah, ternyata kenyataannya tidak demikian. Tidak semudah itu untuk mendapatkan *incentive* dari segi suku bunga. Kita harus melihat *incentive* dari *supply* dan *demand*, karena *demand* juga harus di-*incentivize*, sama halnya dengan *consumer*. Jadi ini hal-hal yang menjadi pekerjaan rumah untuk *financial*. Untuk *funding*-nya, mungkin tersedia banyak di seluruh dunia apabila kita ingin memobilisasi *financing* dengan memperhatikan *cost of fund* dan *return of investment*.

Ada beberapa aspek penting mengenai *natural climate solution*. Resource dari *project-project* di Indonesia luar biasa. Kemungkinan Indonesia menempati peringkat nomor dua setelah Brazil. Namun dalam kenyataannya, hanya terdapat tujuh *NCS (Natural Climate Solutions) project* hanya di Indonesia. Kemudian terdapat *project* lain seperti *circular economy*, *waste management*, dan sebagainya. Sebenarnya semuanya sudah *on the right track*, kita tahu harus bagaimana, tapi perlu banyak dukungan. *Of course* kita perlu *push* untuk energi EBT dan kemudian kita bisa masuk ke dalam *carbon*. Kita merasa *unlocking carbon potential* sangat besar untuk Indonesia karena kita mempunyai *resource* besar. Kita juga sudah mempunyai peraturan untuk ekonomi karbon. Tapi *unfortunately* masih menjadi permasalahan karena *trading-nya* tidak semudah itu.

Kemudian dapat dilihat bahwa kuncinya adalah *driving electricity*. Kita sekarang sudah sering mendengar mengenai *EV (Electronic Vehicle)*. Saat ini sudah tersedia banyak *incentive* untuk *EV*. Semua harus *going electric*, baik itu sepeda motor dan mobil. Akan tetapi insentif yang diberikan pemerintah kurang menarik untuk *consumer*. Saat ini *dealer-dealer* sudah diberikan insentif untuk pajak dan lain-lain, bahkan kita mendapat subsidi untuk sepeda motor. Diperlukan aspek kebersamaan apabila kita ingin *drive* hal-hal ini. Kita harus kolaborasi. Ini tidak bisa dilaksanakan sendiri. Jika kita ingin melakukan sesuatu yang penting, berarti harus kita lakukan bersama-sama. Tidak hanya dari pemerintah dan pelaku usaha, namun juga dari masyarakat. Apabila teman-teman di sini mempunyai keinginan untuk membeli sepeda motor, belilah sepeda motor atau mobil listrik. Karena ini juga akan membantu dalam pencapaian kita, *net-zero*. Demikian, terima kasih.

Cazadira Fediva Tamzil (Pijar Foundation), Moderator:

Terima kasih, Bu Shinta. Pak Agus Sari, bagaimana tanggapannya, Pak?

Agus Sari (Landscape Indonesia), Panelist:

Terima kasih. Saya setuju bahwa kebijakan yang dimiliki Indonesia sudah banyak, sebagaimana yang Tiza katakan. Permasalahannya bukan kebijakan, tetapi bagaimana mengimplementasikannya? Apakah konsisten dengan kebijakannya? Jadi itu permasalahannya. Kita dipandang seolah-olah kita pihak yang lebih lebih banyak merusak, ketimbang melindungi. Mereka berkata bahwa penggunaan karbon dipersulit. Padahal faktanya, justru pihak lain yang lebih banyak merusak. Konsistensi terkait *renewable* pun sudah saya ketahui. Saya bahkan sudah memasang solar panel sebelum ada kebijakan itu, jadi saya bisa 100% *renewable* sekarang. Tapi PLN tidak akan membayar saya karena tidak terdapat kebijakan terkait hal itu.

Ridha tadi bicara mengenai *ETM (Energy Transition Mechanism)*. Ada satu *deal* cukup besar di tahun lalu, yaitu *JETP (Just Energy Transition Partnership)*. 20 miliar dolar AS adalah dana yang besar sekali, empat kali lipatnya INA. Jika dilihat dari sisi *climate deal* yang pernah ada, 20 miliar dolar AS itu adalah *the largest ever climate deal in one country*. Tapi *is it big enough?* Kita mensubsidi energi 30 miliar dolar AS per tahun. Jadi *is it big or is it small?* Itu relatif. *How much would we need per year* untuk kita menuju *net-zero 2060?* Kami membuat studinya bersama-sama saat itu, yang kita butuhkan sekitar 200 miliar dolar AS per tahun sampai tahun 2060. Memang dibutuhkan banyak sekali uang untuk *invest* di *net-zero*. Investasi mempunyai *return* dan *multiplier effect* dalam ekonomi. Perhitungan tersebut memperlihatkan bahwa ketersediaan *jobs* akan meningkat apabila kita *invest* untuk *net-zero* atau *green sector*, karena

dengan memasang solar panel akan menyerap lebih banyak *jobs* — 7 hingga 10 kali lipat lebih banyak dari orang yang dibutuhkan.

Sehingga ekonomi yang berbasis *renewable* dapat memberikan pekerjaan lebih kepada orang-orang Indonesia. Secara *net effect*, kita akan meningkatkan lapangan kerja dan menurunkan pengangguran dari *green jobs*. Kemudian terdapat proyek yang konsisten lagi yaitu *Net Sink* pada tahun 2030. Saya kira itu yang paling bagus dan saya harus angkat topi kepada KLHK bahwa deforestasi kita menurun drastis. Selama sepuluh tahun kita berhasil turun sebesar 90%. Dari lebih dari sejuta ha per tahun, sekarang menurun sekitar 100 ribuan. Itu bagus, kebijakan dan pelaksanaan sudah bagus. Akan tetapi masih terjadi inkonsistensi. Lebih baik untuk mengutamakan aturan yang sudah semestinya diperbaiki terkait keberadaan kebun-kebun sawit di dalam hutan, ketimbang penjatuhan hukuman bagi orang-orang yang masuk ke dalam hutan.

Bicara soal masalah struktural, mengingat tadi sudah disebutkan terdapat satu lembaga atau satu perusahaan yang monopoli sehingga masyarakat tidak bisa memasang *renewable energy* di rumah, kita mempunyai satu cara. Tidak semuanya harus dilakukan melalui lembaga tersebut, melainkan lembaga tersebut yang harus beli dan jual kembali.

Selain itu kita bisa gunakan cara seperti ini untuk perusahaan-perusahaan internasional. Perusahaan internasional harus memenuhi target-target *renewable* secara internasional. Perusahaan tersebut harus mencapai 100% *renewable* pada tahun tertentu, contohnya L'Oreal, PwC, dan Nike. Akhirnya, Nike tidak lagi berkembang di Indonesia. Mereka pindahkan semua pengembangan bisnisnya ke Vietnam, karena di Vietnam mereka bisa mendapatkan 100% *renewable*. Caranya adalah mereka membeli langsung dari produsen *renewable energy*, sehingga mereka cukup sewa kabel PLN saja. Itu yang saya kira harus kita cari jalan keluarnya.

It's a collective action. Jadi kita harus bekerja sama. Semua punya peran. Yang paling penting adalah *political will*. Kita perlu melihat masa depan dan melupakan apa yang mungkin bisa menjadi *conflict of interest*. Kita perlu melihatnya secara lebih besar, kebangsaan, dan lebih ke-Indonesia-an. Ekonomi hijau pun juga jarang ada. Banyak petinggi yang mengambil keputusannya untuk energi, sekaligus mempunyai tambang batu bara dan PLTU. Kebijakan yang dibuat pasti disusun sedemikian rupa supaya bisnisnya tidak terganggu.

Political will adalah hal yang paling penting dan itu adalah *collective action demand* dari setiap orang. Terima kasih.

Q&A SESSION

Cazadira Fediva Tamzil (Pijar Foundation), Moderator:

Terima kasih, Pak Agus Sari. Kita langsung masuk ke sesi Q&A. Silakan langsung nama dan satu pertanyaan supaya yang lain bisa bertanya.

Nandita Nurahma, Jakarta Selatan:

Terima kasih untuk pemaparan dan *sharing* hari ini. Izinkan saya menjelaskan terlebih dahulu. Jadi tadi terkait dengan Pak Ridha yang tadi sudah menjelaskan bahwa akan ada kerja sama untuk *electric vehicle* dan *mechanism from culture renewable*. Kita sudah tahu bahwa terdapat hilirisasi nikel terkait dengan *EV* yang Ibu sampaikan tadi. Seperti yang kita ketahui, terdapat tiga provinsi yakni Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, dan Maluku Utara terkait dengan hilirisasi nikel ini. Tadi disebutkan perbandingan fakta bahwa kita butuh nikel untuk *EV*, akan tetapi ternyata beberapa hal ini berpengaruh terhadap lingkungan. Kami sebagai para generasi muda harus mempunyai *political will* yang sama, kita harus duduk sebagai sebuah bangsa. Saya meminta pendapat untuk kami generasi muda, apa yang sebenarnya bisa kita lakukan? Karena tadi kita melihat ada dua hal yang bertolak belakang, baik dari segi lingkungan maupun tujuan kita mencapai Indonesia *Net-Zero* 2060. Terima kasih.

Cazadira Fediva Tamzil (Pijar Foundation), Moderator:

Terima kasih. Pertanyaan berikutnya. Kita langsung tampung tiga pertanyaan di satu ronde. Silakan langsung segera berikan pertanyaannya supaya yang lain bisa mendapat kesempatan untuk bertanya juga.

Mili, Anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta:

Terima kasih untuk pemaparannya, narasumber. Saya apresiasi untuk kebijakan mengenai *renewable energy*, tapi sebetulnya dari pihak pemerintah, khususnya Jakarta, ini sangat tidak populer untuk dibahas. Karena kita akan kembali lagi membahas soal *budget* atau anggaran. Hal yang menarik dari kebijakan ini ada angka belanja. Angka belanja adalah celah yang cukup besar sebagai ruang korupsi untuk dinas. Jadi apabila ada kebijakan *renewable energy*, maka budgetnya akan dibelanjakan untuk semua yang dibutuhkan. Semisal untuk *electric vehicle*, tidak semuanya disetujui untuk pengajuan dari beberapa dinas. Tapi ada yang menarik di sini, dimana budget utilitas di Jakarta cukup tinggi setiap tahun dan mungkin bisa dijadikan gambaran. Jika budget utilitas dalam satu tahun dapat menghabiskan sekitar Rp 1-3 milyar, berapa nilai investasi dan bagaimana *return*-nya jika disandingkan dengan *budget* solar? Terima kasih.

Cazadira Fediva Tamzil (Pijar Foundation), Moderator:

Terima kasih. Saya langsung berikan *floor* kepada seluruh *panelist* untuk menyampaikan tanggapan kepada dua pertanyaan. Saya mulai dengan Pak Ridha terkait pertanyaan pertama terutama ditujukan mengenai *cost* dari investasi hijau itu sendiri. Bagaimana kita menyeimbangkan *economic growth* dengan *environmental sustainability*? Bagaimana perspektif pemerintah untuk menyeimbangkannya?

Dr. Ridha Wirakusumah (Indonesia Investment Authority), Panelist:

Sebetulnya mungkin saya bukan orang yang tepat untuk menjawab ini, karena saya lebih ke investasi secara langsung, bukan *policy making*. Sekarang Indonesia memang mempunyai sumber alam yang namanya nikel, bauksit, dan manganese. Itu semua adalah materi-materi yang penting untuk industri hijau. Saat ini Indonesia dalam masa pemerintahan Pak Jokowi mempunyai kebijakan yang bersifat memaksa bahwa ekspor *raw material* tidak diperbolehkan, harus diolah di Indonesia. Itu yang sudah dilakukan. Apabila dilihat dalam 12 semester terakhir ini, kita sudah *trade supplies* dan *balance of payment surplus*, itu adalah hasil dari ekspor yang sudah tidak baku lagi. Dari situ arahnya sudah bagus. Bagaimana jika ber-*impact* terhadap lingkungan? *It's a different challenge*, tapi setahu saya sekarang produksi-produksi dan produsen-produsen nikel yang ada di tiga provinsi itu sangat dilihat dan di-*observe* dengan baik.

Bagaimana dengan *the cost of economy to Indonesia*? Apabila Indonesia tidak mengekspor nikel, mungkin negara lain akan ekspor. Selain itu jika Indonesia tidak membangun *downstream*-nya, akan sangat disayangkan karena Indonesia mempunyai 280 juta populasi. Jadi Indonesia *can actually become the center of the production of electric vehicle* di *Southeast Asia*, paling tidak di dunia karena tidak banyak negara yang mempunyai kelebihan itu.

Yang harus kita perhatikan, semuanya harus bisa merata. Contohnya dimulai dari produksi baterai hingga pembuatan baterai, baterai *swap*, *charging station*, dan pembentukan pabrik-pabrik *electric vehicle* harus dilakukan di sini. Itu yang harus kita lihat, karena itu yang akan kita *create*. Jadi pertanyaannya adalah *is the cost of economy to development and lingkungan ada? Iya, ada. The option is, do you want to not do anything or do you want to do something and develop something* untuk kebaikan masyarakat? Itu saja.

Shinta Widjaja Kamdani (Kamar Dagang, dan Industri Indonesia), Panelist:

Saya tambahkan sedikit supaya berkaitan. Saya teringat dengan pembicaraan antara Pak Luhut dan John Kerry di masa lalu. Pak Luhut berkata, ‘*Ok, you will support us* agar kita bisa mencapai *net-zero*.’ Pemerintah Amerika ingin mendukung dengan adanya JETP dan lain-lain, namun harus di-*make sure* bahwa hal itu tidak akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saya merasa ini sangat penting. Tadi pertanyaannya, bagaimana? Karena terkadang banyak sekali yang bertentangan. Ini mungkin menjadi suatu pekerjaan rumah yang tidak mudah untuk kita imbangi antara kepentingan dari segi lingkungan dan segi ekonomi.

Jika kita bicara mengenai nikel, memang harus kita perhatikan. Maka dari itu, kita juga harus bersuara cukup kritis untuk mengevaluasi sejauh mana perkembangan nikel mempengaruhi lingkungan hidup, yang tentunya berkaitan dengan teknologi. Sekarang negara-negara lain sudah mulai memperhatikan hal ini dari segi teknologi. Jadi ini merupakan sesuatu yang harus dijadikan perhatian.

Saya juga mau singgung dari segi ekonomi untuk pemerataan. Kita ingin agar tidak hanya dari segi penciptaan lapangan untuk Indonesia sendiri, akan tetapi kita juga ingin partisipasi dari pelaku lokal dalam pengembangan ekosistem, baik itu *EV* dan *EBT*. Pemain lokal tidak bisa hanya berasal dari pengusaha besar, akan tetapi juga dari UMKM (Usaha Mikro Kecil Menengah). UMKM bisa menjadi bagian dari sebuah ekosistem, terutama *supply chain* yang harus dibangun. Oleh karena itu hal ini menjadi salah satu perhatian di KADIN, yakni membangun *Net Zero Hub* guna membangun *SME*. UMKM dapat mendorong bagaimana caranya mereka berpartisipasi dalam pencapaian *net-zero*. Saya merasa hal ini harus kita perhatikan dari segi Indonesia secara menyeluruh karena kita *we are talking about Indonesia incorporated. It's not just about one aspect*, tapi semua.

Cazadira Fediva Tamzil (Pijar Foundation), Moderator:

Silakan, Mbak Tiza.

Tiza Mafira (Climate Policy Initiative Indonesia), Panelist:

Saya tidak setuju dengan satu pernyataan pemerintah yang sering dilontarkan. Pemerintah sering bicara bahwa, ‘Kita harus mencapai *NZE* dan kita harus melindungi lingkungan, tetapi jangan sampai mengorbankan pertumbuhan ekonomi.’ Saya tidak sepakat dengan pernyataan tersebut. Kalimat tersebut

seharusnya kita tidak akan mencapai pertumbuhan ekonomi jika lingkungan kita tidak *survive*. Bagaimana kita dapat melakukan kegiatan ekonomi dengan nyaman jika jalanan banjir, hutan kebakaran, atau langit oranye seperti New York minggu lalu karena kebakaran hutan di Kanada? Bagaimana kita dapat melakukan kegiatan ekonomi dan mewujudkan masa depan yang kita inginkan jika lingkungan kita tidak sehat? Perlindungan lingkungan adalah harga mati.

Bicara perkembangan nikel dan *EV*, menurut saya tidak ada yang salah dengan teknologi *electric vehicle*. Itu bagus dan bersih. Tetapi yang menjadi permasalahan di Indonesia listrik batu bara adalah sumber listrik yang digunakan untuk *men-charge EV*. Yang saya heran, banyak sekali subsidi yang diberikan untuk kendaraan listrik, tetapi di mana subsidi yang diberikan untuk energi terbarukan, solar panel, dan tenaga angin? Kenapa mudah sekali untuk membeli *EV*, tetapi tidak mudah untuk membeli solar panel? Ada sebabnya, karena Indonesia, terutama Jawa-Bali mempunyai kapasitas listrik yang berlebih sehingga pemerintah ingin *demand* listrik secara lebih. Maka dari itu ada rencana untuk jual mobil listrik supaya tidak *over capacity* dan listriknya terpakai. Menurut saya, ada cara lain untuk menghadapi *over capacity* ini. Daripada mencoba meningkatkan *demand* yang kemudian nanti akan meningkat dengan sendirinya karena populasi kita akan terus bertumbuh, kenapa tidak dikurangi *supply*-nya? Kenapa tidak ditutup saja salah satu PLTU batu bara yang memang sudah tidak dibutuhkan lagi? Karena itu cukup mencemari mempolusi udara kita saat ini. Warga Jakarta pasti tahu jika kalian mengecek *AQI (Air Quality Index)* di *handphone* setiap pagi dan hasilnya tidak pernah bagus. *It is very unhealthy*. Itu disebabkan karena PLTU batu bara yang berada di sekitar Jakarta.

Tadi sempat disebutkan oleh Pak Ridha bahwa *ETM* akan mencoba memfasilitasi skema keuangan yang bisa mempersiapkan batu bara dini. Tetapi itu harus dikawal bersama-sama karena sampai sekarang belum mencapai *deal*. Menurut saya tahun ini harus mencapai *deal*, apabila tidak terjadi maka kita tidak mempunyai kepercayaan bahwa *net-zero emission* dapat tercapai di masa depan. Saya sangat berharap bahwa setidaknya satu PLTU batu bara tahun di Jawa-Bali tutup tahun ini.

Cazadira Fediva Tamzil (Pijar Foundation), Moderator:

Thank you, Mbak Tiza. Pak Agus Sari, silakan untuk *short statement* sekaligus menutup sesi.

Agus Sari (Landscape Indonesia), Panelist:

Saya cukup mengamini saja. Saya setuju bahwa penutupan baru bara di Jakarta akan berdampak sangat positif untuk wilayah Jakarta, karena itu adalah salah satu penyebab *AQI (Air Quality Index)* Jakarta termasuk dalam kategori *toxic* selama beberapa hari. Menutup batu bara bukan hanya dapat menurunkan karbon dioksida, tetapi juga menurunkan polusi lokal. Dengan demikian kita sebagai orang Jakarta harus menuntut itu demi kesehatan kita semua. Jika rencana pembangunan seluruh PLTU di sekitar Jakarta yang berjarak 100 km dari pusat kota Jakarta dibangun semua, maka akan ada 24 unit PLTU batu bara di sekitar Jakarta. Jakarta pun akan menjadi kota yang dikelilingi unit pembangkit batu bara terbanyak sedunia. Jangan heran kalau kita mempunyai *air quality* terburuk sedunia.

Kemudian bicara soal kendaraan, itu hal yang sistematis. Jika semuanya diganti dengan *EV*, apakah kemacetan bisa berkurang? Tentu tidak. Jadi kita harus investasi secara besar untuk kendaraan umum. Jakarta termasuk kota yang mempunyai sistem kendaraan umum paling baik di Indonesia. *Do that even more* untuk kita semua.

Mengenai hilirisasi, saya setuju bahwa itu hal yang bagus bagi ekonomi Indonesia dan bersifat *renewable* — dengan syarat harus dilakukan dengan standar lingkungan yang tinggi, standar *human rights* yang tinggi, dan tanpa mengorbankan siapa pun. Sekarang orang-orang yang berada di sekitar pusat industri nikel tidak bisa mencari ikan karena lautnya sudah tercemar. Standar itu harus diperhatikan karena cepat atau lambat pembeli akan membeli dari tempat lain yang standarnya lebih tinggi dari kita. Terima kasih.

Cazadira Fediva Tamzil (Pijar Foundation), Moderator:

Terima kasih, Pak Agus Sari. Terima kasih, teman-teman atas partisipasinya di sesi “Mimpi Bebas Emisi Indonesia”. Tadi kita sudah banyak mendengar tentang pentingnya peran kebijakan dalam menjadikan Indonesia sebagai tujuan investasi. Investasi dan pertumbuhan ekonomi tidak boleh mengorbankan lingkungan kita, di mana kita akan terus hidup di sini. Terima kasih banyak untuk partisipasinya.